

CV. ARCHEN



DOKUMEN LAPORAN AKHIR

Survei Indeks Persepsi Korupsi di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
(Dispendukcapil)

2017

KATA PENGANTAR

Laporan akhir ini di susun sebagai bagian tugas pekerjaan dari CV. ARCHEN untuk melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta pada tahun 2017 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan informasi hasil akhir dari pelaksanaan survei sebagaimana yang telah tertera dalam kontrak.

Laporan akhir ini merupakan atau sebagai alat bukti / bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta.

Demikian laporan akhir ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CV. ARCHEN

Rosyid Nukha, S. Sos.
Direktur

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar belakang	4
1.2. Maksud dan tujuan	5
1.3. Landasan hukum	6
1.4. Lingkup penyusunan	7
1.5. Organisasi pelaksana	7
1.6. Rencana kerja	9
BAB II METODOLOGI	10
2.1. Metodologi penelitian	10
2.2. Populasi dan sampel	10
2.3. Unit analisis	11
2.4. Teknik pengumpulan data dan quality control	11
2.5. Teknik analisis data	12
2.6. Tahapan pelaksanaan	12
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	20
3.1. Profil responden	20
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	23
3.3. Indeks persepsi korupsi DISPENDUKCAPIL	27
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan DISPENDUKCAPIL	28
BAB IV PENUTUP	30
4.1. Kesimpulan	30
4.2. Rekomendasi	30
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. Lingkup penyusunan survei	7
Tabel 2. Rencana kerja	9
Tabel 3. Model alur penyusunan Survei IPK menuju Zona Integritas	13
Tabel 4. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi	18
Tabel 5. Nilai Persepsi	19
Tabel 6. Tingkat pendidikan responden	20
Tabel 7. Jenis pekerjaan responden	20
Tabel 8. Domisili reponden	21
Tabel 9. Usia responden	21
Tabel 10. Jenis layanan yang dipergunakan responden	23
Tabel 11. Indeks pada indikator manipulasi peraturan	23
Tabel 12. Indeks pada penyalahgunaan jabatan	23
Tabel 13. Indeks pada indikator menjual pengaruh	24
Tabel 14. Indeks pada indikator transparansi biaya	24
Tabel 15. Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia	25
Tabel 16. Indeks pada indikator tambahan biaya	25
Tabel 17. Indeks pada indikator hadiah	26

Tabel 18. Indeks pada indikator transparansi pembayaran	26
Tabel 19. Indeks pada indikator percaloan	27
Tabel 20. Indeks pada indikator perbuatan curang	27
Tabel 21. Indeks Persepsi Korupsi DISPENDUKCAPIL	28
Tabel 22. Persepsi Korupsi DISPENDUKCAPIL	28
Tabel 23. Masukan dan pandangan pengguna layanan DMPTSP	29

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

Lampiran 2. Skor jawaban responden

Lampiran 3. Dokumentasi pengumpulan data

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sejak Tahun 2010 hingga tahun 2017, Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan telah memperoleh Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian selama enam kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan. Prestasi tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kerja keras dan komitmen yang kuat sehingga Pemerintah Kota Surakarta mampu mempertahankannya. Oleh karena itu sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) merupakan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis dan mengelola sumber daya yang cukup besar.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta menjadi lokasi Pilot menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu memperoleh masukan dari masyarakat dalam memperoleh pelayanan dilingkungannya.

Dalam kajian menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani akan menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan diketahui diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan tujuan

Maksud Penyusunan Kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Kota Surakarta adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Kota Surakarta adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Kota Surakarta.

1.3. Landasan hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

1.4. Lingkup penyusunan

Tabel 1
Lingkup Penyusunan Survei

No.	LINGKUP PENYUSUNAN
1.	Survei Pendahuluan / Pengumpulan data
2.	Penyusunan design survei
3.	Penyusunan instrumen / Kuesioner
4.	Pembahasan dan finalisasi kuesioner
5.	Validasi instrument
6.	Rekrutmen, Pembekalan surveior
7.	Pengumpulan data / wawancara
8.	Pengolahan data
9.	Penyusunan draft laporan
10.	Presentasi draft laporan akhir
11.	Revisi dan penyempurnaan laporan

1.5. Organisasi Pelaksana

Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan bagian dari kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Kota Surakarta adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Survei yang akan dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta ini akan dilaksanakan oleh CV. ARCHEN.

Saat ini CV. Archen didukung oleh tenaga ahli dari berbagai bidang. Selain itu di internal manajemen terdiri struktur kepengurusan direktur dan wakil direktur.

Personal Inti

- A. Direktur : Rosyid Nukha, S. Sos.
B. Wakil Direktur : Addin Kurnia Putri, S.Sos.

Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : CV. Archen
2. Alamat Kantor : Jl. Kembang Kemuning No. 02,
Randurejo RT 07 RW 14 Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
3. No. NPWP : 21.005.655.2-526.000
Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak-Departemen
Keuangan Republik Indonesia Kanwil DJP Jawa Tengah II Kantor
Pelayanan Pajak Surakarta No. : PEM- 1470/ WPJ.32/KP.0603/2007
4. Akta Notaris : Nomor 2, Tanggal 19 April 2007.
Notaris : Se'un Sungkar,SH-SK.MEN-KEH
I.NO C90.HT.03.01. TH.1999,
TGL 11-01-1999
5. SIUP : 503/314/11.34/SIUP-PK/V/2007
Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan
Terpadu Kabupaten Karanganyar.
6. Ijin Gangguan (HO) : 503.530/199 TAHUN 2007
Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan
Terpadu Kabupaten Karanganyar.
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 113437400569
Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan
Terpadu Kabupaten Karanganyar.
8. Referensi Bank : Bank Jateng Cabang Surakarta

1.6. Rencana kerja

Jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian seluruh paket Pekerjaan Penyusunan Dokumen Zona Bebas Korupsi, berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung dari diputuskannya kesepakatan kontrak kerja dan disepakatinya uraian pekerjaan diatas, berikut adalah jadwal pelaksanaannya :

Tabel 2
Tabel Rencana Kerja

No	Kegiatan	Minggu Ke				
		1	2	3	4	5
1.	Survei Pendahuluan / Pengumpulan data					
2.	Penyusunan design survei					
3.	Penyusunan instrumen / kuesioner					
4.	Pembahasan dan finalisasi kuesioner					
5.	Validasi instrumen					
6.	Rekrutmen, Pembekalan surveior					
7.	Pengumpulan data / wawancara					
8.	Pengolahan data					
9.	Penyusunan draft laporan					
10.	Presentasi draft laporan akhir					
11.	Revisi dan penyempurnaan laporan					

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut (Sugiyono:2003).

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian (Syamsudin & Damiyanti: 2011).

2.2. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2001: 60).

Menurut Margono (2004: 27) menyatakan bahwa dalam teknik ini pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui di lokasi yang menjadi titik pengambilan sampel. Disamping itu penentuan sampel dalam survei ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian (Singarimbun & Effendi, 1991).

Roscoe dalam buku *Research Methode For Business* (1982) yang dikutip Sugiyono (2012) menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam sebuah penelitian adalah antara 30-500.

Maka sampel yang akan diambil dalam penelitian ini ditetapkan 250 sampel.

2.3. Unit analisis

Unit analisis dalam riset ini yaitu perusahaan atau instansi, namun wawancara questioner tetap ditujukan kepada satu orang yang ditunjuk sebagai responden yang mewakili diri sendiri atau perusahaan yang menggunakan layanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Unit analisis survei ini adalah Pengguna layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

2.4. Teknik pengumpulan data dan quality control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dengan wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu bulan September s//d Oktober 2017. Data dikumpulkan oleh enumerator yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja enumerator akan diawasi oleh tim quality control (QC). QC akan mengecek kerja enumerator saat mewawancarai responden, meneliti kuesioner, serta akan *me-recall* atau menghubungi ulang beberapa responden yang jawabannya tidak lengkap, sekaligus memastikan apakah responden benar-benar diwawancarai enumerator.

2.5. Teknik analisis data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif.

Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapang, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 3

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



- a. Studi Referensi Kajian Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia.

Definisi Persepsi Korupsi

Definisi Konseptual

Korupsi berasal dari kata *Corruption* yang berarti kerusakan. Menurut Kamus Istilah Hukum Latin Indonesia *Corruption* berarti penyogokan. Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi juga dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

Definisi paling sederhana dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok (World Bank & IMF). Berdasar pandangan hukum, dikatakan korupsi bila memenuhi unsur-unsur: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan unsur terakhir adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan Alatas, S.H dalam Korupsi Musuh Bersama (2004) menyebutkan "*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*". Pengertian menurut Alatas dapat diartikan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Dalam bukunya, Danil, E (2011: 7) menyimpulkan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang melanggar norma-norma tugas, kesejahteraan, dan kerahasiaan serta mengabaikan dampak dari tindakan tersebut karena menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong mengatakan bahwa suatu tindakan dikatakan sebagai tindakan korupsi jika seseorang atau individu melakukan pelanggaran dengan menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain.

Dalam Kamus Lengkap Oxford (*The Oxford Unabridged Dictionary*) korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuaipan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan *World Bank*,

korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*).

Definisi lengkap korupsi menurut *Asian Development Bank (ADB)* adalah korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Definisi Operasional

Jeremy Pope (2007: xxvi) mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *Toward a General Theory of Official Corruption* menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:

1. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
2. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.
11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.

14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi (KPK, 2006: 19-20).

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu:

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.
2. Suap
3. Illegal profit

4. Secret transaction
5. Hadiah
6. Hibah (pemberian)
7. Penggelapan
8. Kolusi
9. Nepotisme

Tabel 4
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

- b. Penyusunan Instrumen Survei Persepsi korupsi menuju Zona Integritas. Penyusunan instrumen dilakukan oleh Tenaga ahli yang di pimpin oleh Team Leader.

Pada kajian persepsi korupsi, ada beberapa kriteria informasi yang harus diperoleh dari responden yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, penyalahgunaan kekuasaan pada penyelenggaraan pelayanan.

- c. Uji Coba Instrumen Survei Persepsi Korupsi menuju Zona Integritas

Uji coba intrsumen perlu dilakukan agar setiap pertanyaan bisa dipahami oleh responden. Uji coba instrumen survei Persepsi Korupsi

diujikan kepada pengguna layanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Uji coba instrumen dilakukan pada September 2017.

d. Survei Persepsi Korupsi menuju Zona Integritas

Pelaksanaan survei semula dilakukan pada tanggal 25 September s/d 6 Oktober 2017, dengan mengambil tempat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta dengan serta di lokasi layanan mobil keliling dengan jumlah responden total sebesar 250.

e. Pengukuran Persepsi korupsi

Metode pengukuran persepsi korupsi dilakukan secara kuantitatif dengan memformulasi skor jawaban responden pada skala 1-4, selanjutnya dikonversi pada nilai 0-100. Hasil akhir akan memunculkan Indeks persepsi korupsi dan indeks kepuasan masyarakat dengan mengacu kepada Tabel Nilai Persepsi berikut :

Tabel 5.
Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Bersih dari Korupsi

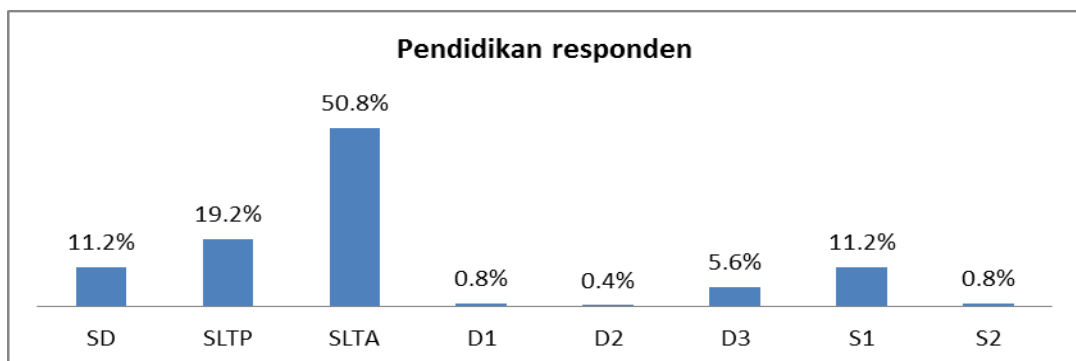
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Dpendukcapil mayoritas memiliki latar Dasar dan Menengah.

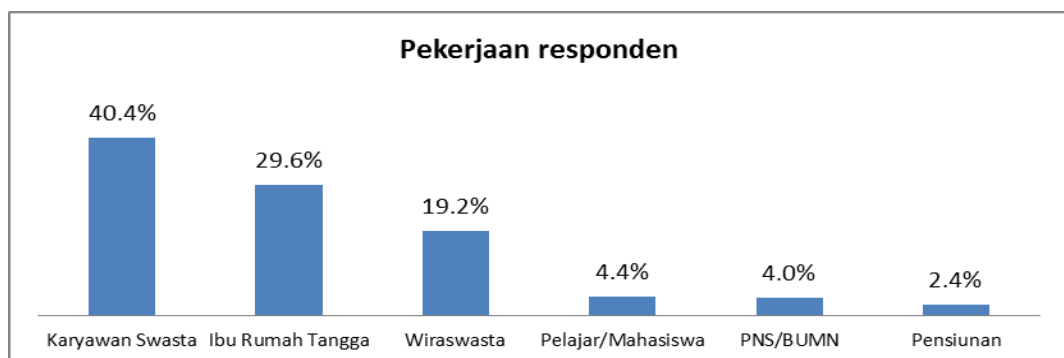
Tabel 6.
Tingkat pendidikan responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 40,4% responden pengguna layanan Dpendukcapil memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta.

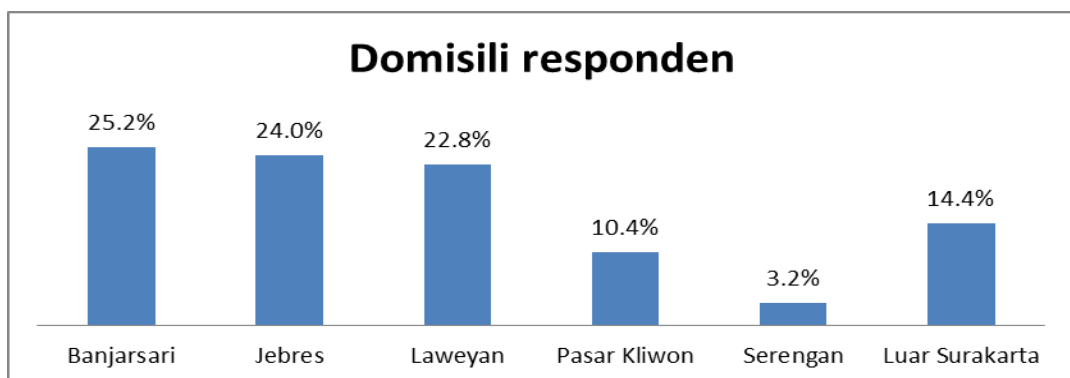
Tabel 7.
Jenis pekerjaan responden



3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling banyak berasal dari kecamatan Banjarsari dengan 25,2%, selanjutnya Jebres 24,0% dan Laweyan dengan jumlah 22,8%.

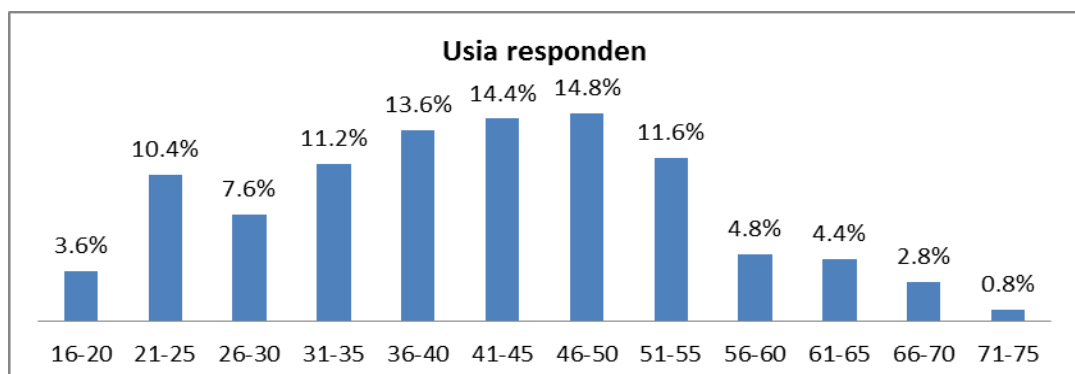
Tabel 8
Domisili responden



3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Dispendukcapil berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 31 tahun s/d 55 tahun. Bagi kelompok usia di atas 55 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

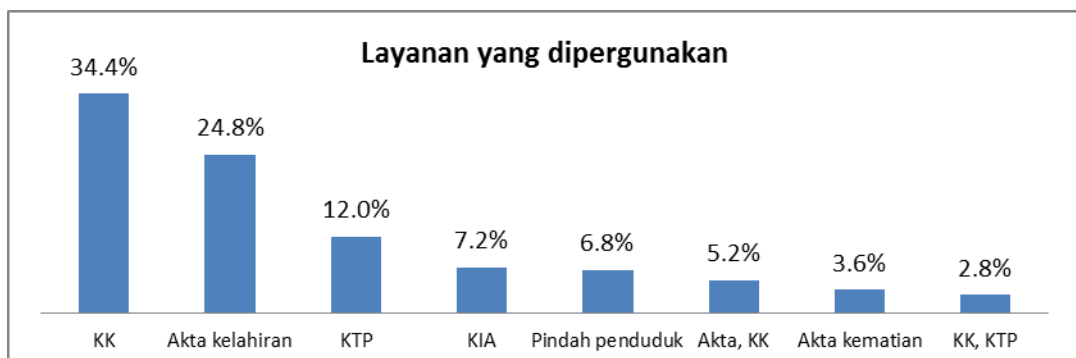
Tabel 9.
Usia responden



3.1.5. Layanan yang digunakan

Layanan dokumen KK menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar 34,4%. Selanjutnya layanan yang banyak dipergunakan adalah layanan dokumen Akta Kelahiran serta layanan pembuatan KTP.

Tabel 10.
Jenis layanan yang dipergunakan responden



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

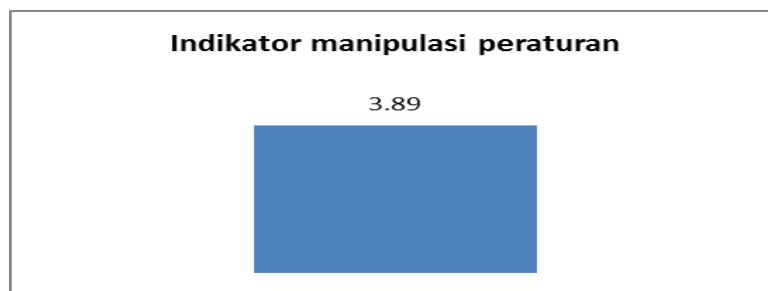
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,89.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Dispendukcapil bersih dari tindakan manipulasi peraturan.

Tabel 11.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan



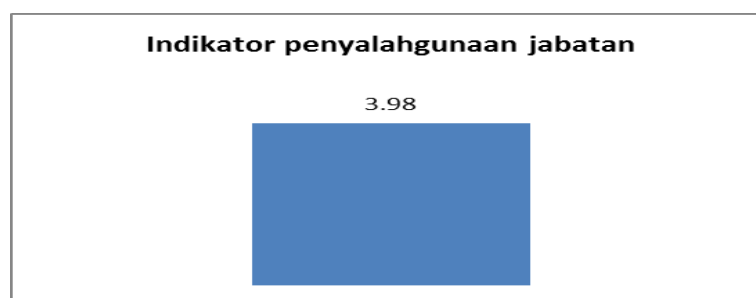
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,98.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Dispendukcapil bersih dari tindakan penyalahgunaan jabatan.

Tabel 12.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

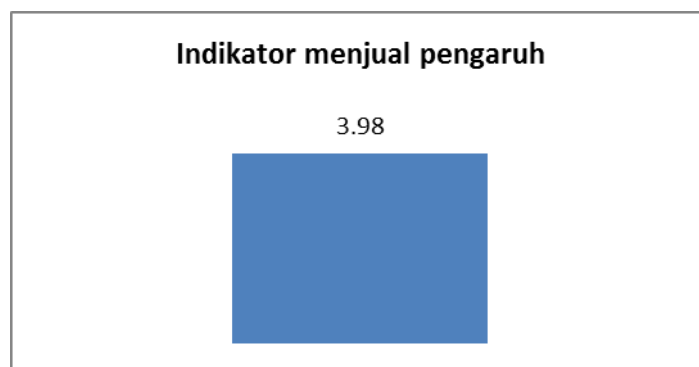


3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,98.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Dispendukcapil bersih dari tindakan menjual pengaruh.

Tabel 13.
Indeks pada indikator menjual pengaruh

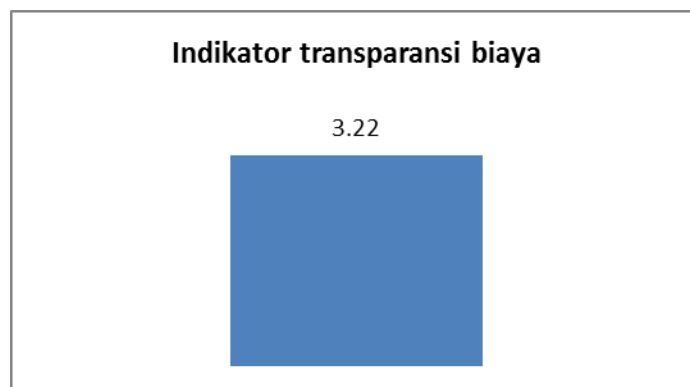


3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,22.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Dispendukcapil cukup bersih dalam tindakan Transparansi Biaya.

Tabel 14.
Indeks pada indikator transparansi biaya



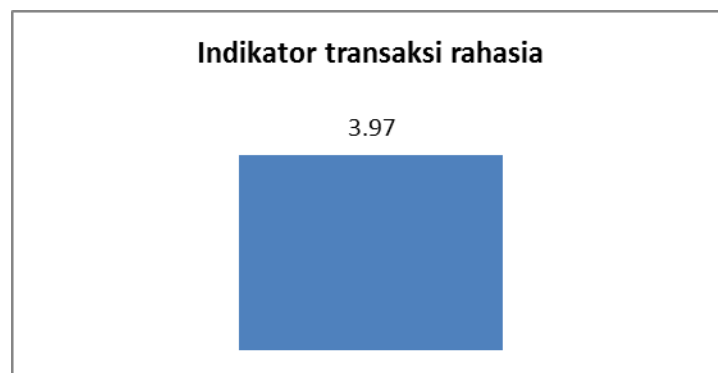
3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,97.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Dispendukcapil bersih dari tindakan Transaksi Rahasia.

Tabel 15.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia



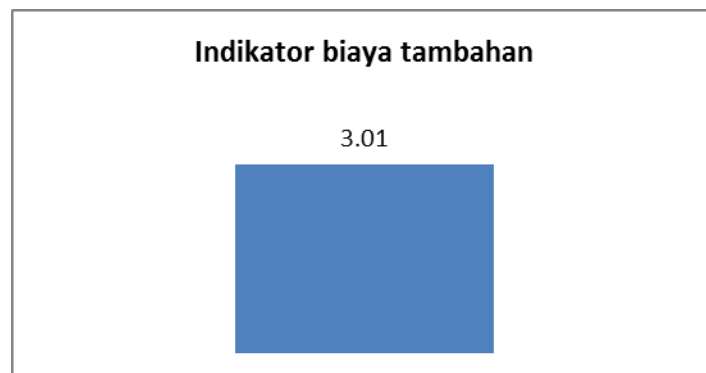
3.2.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,01.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Dispendukcapil cukup bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator tambahan biaya

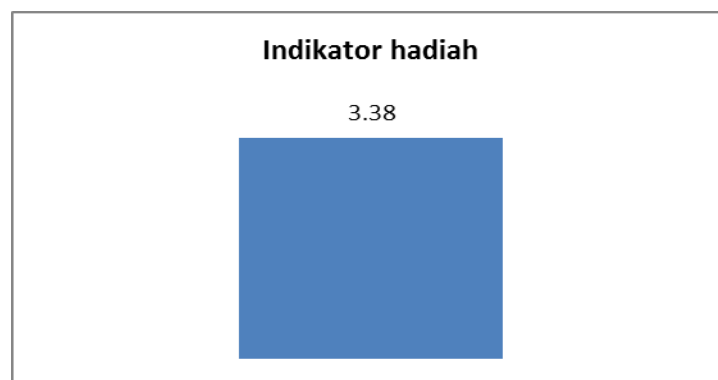


3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,38.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Dispendukcapil bersih menyangkut Hadiah.

Tabel 17.
Indeks pada indikator hadiah

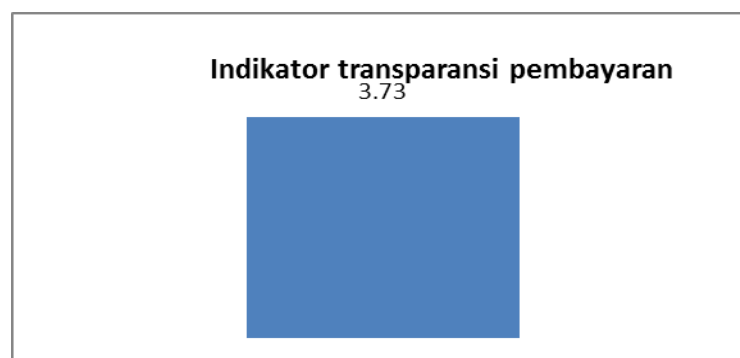


3.2.8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transpparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3,73.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Dispendukcapil bersih dalam hal Transparansi Biaya.

Tabel 18.
Indeks pada indikator transparansi pembayaran

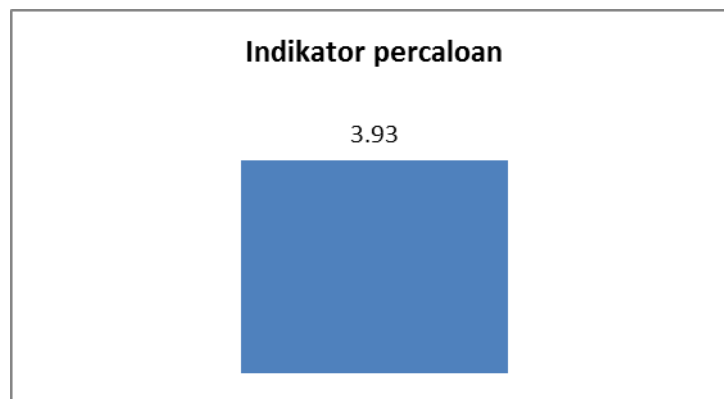


3.2.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,93.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Dispendukcapil bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 19.
Indeks pada indikator percaloan

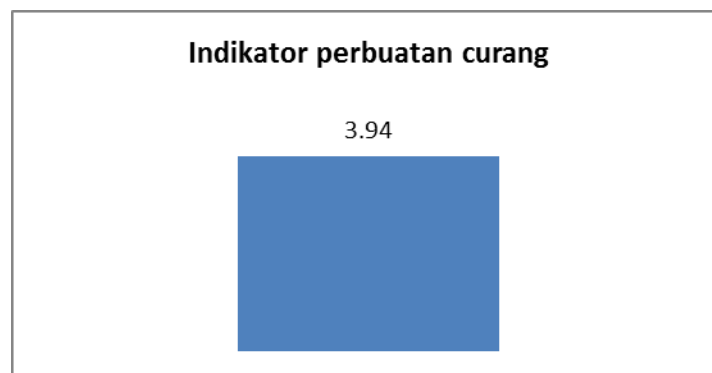


3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,94.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Dispendukcapil bersih dari Perbuatan Curang.

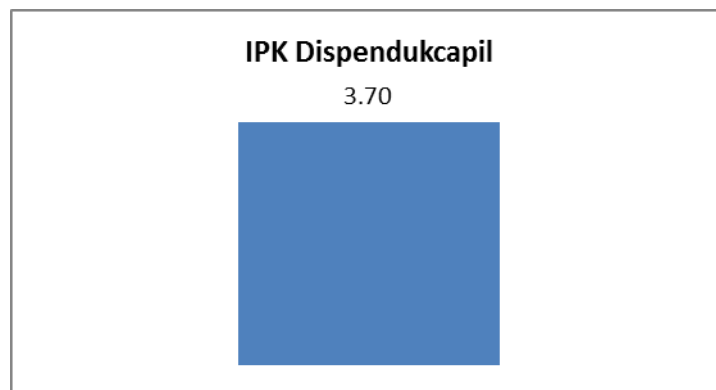
Tabel 20.
Indeks pada indikator perbuatan curang



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Dispendukcapil

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta sebesar 3,70.

Tabel 21.
Indeks Persepsi Korupsi Dispendukcapil



Indeks 3,70 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 92,54.

Tabel 22.
Persepsi Korupsi Dispendukcapil

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Bersih dari Korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Dispendukcapil

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 23.

Masukan dan pandangan pengguna layanan Dispendukcapil

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Dispendukcapil
1	Pada saat waktu istirahat agar tetap ada petugas jaga
2	Ditingkatkan pelayanannya dengan cara penambahan loket dan mempercepat proses agar antrian tidak terlalu panjang
3	Peningkatan akurasi informasi untuk meminimalisir kesalahan dan keterlambatan dalam pengambilan.
4	Meningkatkan kualitas informasi berkaitan dengan persyaratan pembuatan dokumen
5	Prasarana seperti LCD agar diperbaiki
6	Proses pengambilan dokumen terlalu lama, seharusnya proses dari pendaftaran dikasih nomor antrian juga untuk pengambilan sehingga yang punya nomor antrian tidak dilewati oleh orang lain.
7	Sudah bagus. Proses dipercepat proses pembuatannya karena sudah hampir 2 minggu

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta diperoleh informasi bahwa Dispendukcapil memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,70** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,89
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,98
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,98
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,22
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,97
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,01
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,38
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,73
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,93
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,94

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2017 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Biaya Tambahan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Indikator Biaya Tambahan memperoleh indeks 3,01 atau masuk pada persepsi Cukup Bersih Dari Korupsi. Oleh karena itu guna mengurangi resiko yang berkaitan dengan indikator tersebut, diperlukan peningkatan kualitas kinerja.

Sebagaimana masukan yang terjaring dari responden, salah satu rekomendasi berkaitan dengan indikator tersebut yaitu meningkatkan kualitas serta arus informasi kepada pengguna layanan kependudukan dan catatan sipil. Informasi yang ditingkatkan berkaitan dengan segala ketentuan mengenai pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil.

Sementara itu rekomendasi lainnya lebih terarah kepada peningkatan kualitas pelayanan administratif, antara lain :

1. Mengoptimalkan pelayanan pada jam istirahat
2. Penambahan loket pelayanan agar tidak terjadi antrian pengguna layanan
3. Maupun juga menertibkan antrian pengguna layanan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

SURVEI PERSEPSI KORUPSI
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISPENDUKCAPIL)
Kota Surakarta
2017

Pengantar dari Tim Survei IPK

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Selamat pagi/siang/sore. Kami adalah tim survei yang ditugasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta untuk melakukan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai persepsi korupsi pengalaman memperoleh pelayanan di Dispendukcapil L. Untuk kepentingan tersebut kami menyampaikan kuesioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami Bapak/Ibu/Saudara/Saudari selama menggunakan layanan di Dispendukcapil.

Tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga apapun jawaban yang dipilih tidak akan mempengaruhi pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Karena Bapak/Ibu/Saudara/Saudari merupakan responden terpilih, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan kami. Untuk meluangkan waktu Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam mengisi kuesioner kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tim Survei

Nomor Kuesioner :		
IDENTITAS RESPONDEN		
Nama Responden	:	
Usia	:	
Jenis Kelamin	:	
Pendidikan terakhir	:	
Pekerjaan	:	
Alamat rumah	:	
Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
No Telp/Hp	:	

**KUESIONER SURVEI
PERSEPSI KORUPSI**

1. Apakah Saudara/i pernah mengalami pelayanan yang dipersulit (tidak sesuai prosedur) oleh petugas dengan maksud tertentu? (**manipulasi peraturan**)
 - a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Sering
 - d. Selalu
2. Apakah Saudara/i pernah ditawari untuk memperoleh pelayanan yang lebih cepat/mudah dengan meminta imbalan tertentu? (**penyalahgunaan jabatan**)
 - a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Sering
 - d. Selalu
3. Apakah Saudara/i pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan Dispendukcapil) yang akan membantu dalam pengurusan izin? (**Menjual pengaruh**)
 - a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Sering
 - d. Selalu
4. Apakah Saudara/i memperoleh informasi mengenai denda resmi dari petugas di Dispendukcapil jika mengalami keterlambatan? (**transparansi biaya**)
 - a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Sering
 - d. Selalu

5. Menurut Saudara/i pernah mengetahui adanya tarif/denda yang disembunyikan atau sengaja ditutup-tutupi oleh petugas layanan? **(Transaksi rahasia)**
 - a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Sering
 - d. Selalu

6. Apakah Saudara/i masih dimintakan tambahan biaya yang tidak berdasarkan tariff/denda resmi dalam pengurusan layanan administrasi dan kependudukan di Dispendukcapil? **(Biaya tambahan)**
 - a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Sering
 - d. Selalu

7. Apakah Saudara/i memberikan tanda terima kasih atas pelayanan yang Saudara/i terima (meskipun tidak diminta)? **(Hadiah)**
 - a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Sering
 - d. Selalu

8. Apakah Saudara/i menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? **(Transparansi biaya)**
 - a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Sering
 - d. Selalu

9. Menurut Saudara/i pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan perizinan di Dispendukcapil? **(Percaloan)**
 - a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Sering
 - d. Selalu

10. Apakah Saudara/i pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Dispendukcapil? **(Perbuatan curang)**
 - a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Sering
 - d. Selalu

Masukan dan saran untuk Dispendukcapil:

Lampiran 2. Skor jawaban responden

No Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	3	4	1	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
8	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	1	4	1	4	3	4	4
11	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	3	2	4	4	4	1	4	4
29	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	2	4	4	4	2	4	4	1	1	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Laporan Akhir
Survei Indeks Presepsi Korupsi

39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
51	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	1	4	4	4	3
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
61	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1
68	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	1	4	4	4	4	4	4	3	3	3
71	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2
72	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4	1	4	1	1	1
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4
76	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4	1	4	1	1	1
78	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Laporan Akhir
Survei Indeks Presepsi Korupsi

82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
84	2	4	4	1	4	1	4	4	4	4
85	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
86	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
87	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
88	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
89	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
90	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
91	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
92	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
93	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
94	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
95	4	4	4	1	4	1	2	4	4	4
96	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
97	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4
98	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
99	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
100	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
101	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
102	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
103	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
104	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4
105	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
106	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
107	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
108	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
109	4	4	4	1	1	1	1	4	4	4
110	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
111	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
112	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
113	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4
114	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
115	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
116	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4
117	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
118	3	4	4	1	4	1	4	4	4	4
119	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4
120	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4
121	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4
122	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4
123	1	4	4	1	4	1	3	4	4	4
124	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4

Laporan Akhir
Survei Indeks Presepsi Korupsi

125	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4
126	4	3	4	1	4	1	4	1	4	4
127	1	4	4	1	4	1	4	4	4	4
128	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
129	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4
130	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
131	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
132	2	4	3	3	4	1	4	2	4	4
133	4	4	3	3	4	2	4	4	4	4
134	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4
135	4	4	3	4	4	2	4	3	4	4
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	2	4	4	3	4	3	4	4	4	4
139	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
142	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
143	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
145	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
148	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
149	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
150	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4
151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
152	4	4	4	3	4	2	4	2	4	4
153	4	4	4	2	4	3	3	4	4	4
154	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
155	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
156	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
157	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
158	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
160	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
161	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
162	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
163	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
164	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
165	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
166	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
167	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4

Laporan Akhir
Survei Indeks Presepsi Korupsi

168	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
169	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
170	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
171	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
172	4	4	4	4	4	1	4	2	4	4
173	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
174	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4
175	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
176	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
177	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4
178	3	4	4	3	4	2	4	2	4	4
179	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
180	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4
181	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
182	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
183	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
184	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
185	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
186	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
187	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
188	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
189	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
190	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
191	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4
192	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
193	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
194	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
195	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
196	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
197	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
198	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
199	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
200	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
201	3	3	4	4	4	3	4	2	4	4
202	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
203	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
204	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
205	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
206	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
207	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
208	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
209	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
210	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4

Laporan Akhir
Survei Indeks Presepsi Korupsi

211	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
212	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
213	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
214	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
215	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
216	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
217	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
218	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
219	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
220	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
221	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
222	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
223	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
224	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
225	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
226	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
227	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
228	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
229	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
230	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
231	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
232	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
233	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
234	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
235	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
236	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
237	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
238	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
239	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
240	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
241	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
242	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
243	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
244	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
245	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
246	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
247	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
248	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4
249	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4
250	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4

Lampiran 3. Dokumentasi pengumpulan data